

[Home](#) » [Kolom Opini](#) » **Konflik India-Pakistan: Dari Sejarah Permusuhan ke Implikasi**

sumber: SBS News/sbs.com.au

Konflik India-Pakistan: Dari Sejarah Permusuhan ke Implikasi

Editor [Annisa](#) — 12 Mei 2025 in [Kolom Opini](#)

AA

Luerdi, M.Si

Dosen Hubungan Internasional Universitas Lampung

JurnalPost.com – Konflik bersenjata antara India dan Pakistan saat ini mengulangi ketegangan di kawasan Asia Selatan. Dilansir oleh Aljazeera, konflik dipicu oleh serangan kelompok bersenjata di Palhagam – wilayah Kashmir yang dikuasai

oleh India – yang menewaskan 25 turis lokal India dan seorang warga Nepal. Otoritas India menuduh keterlibatan Pakistan dalam insiden 22 April tersebut, namun ditolak keras oleh Pakistan.

Ad by **CRITEO**[Report this ad](#)[Ad choices](#)

Militer India melakukan serangan “Operation Sindoor” ke wilayah Pakistan sebagai bentuk “tuntutan pertanggungjawaban.” Sementara, Pakistan membalas melalui “Operation Bunyan Marsoos.” Walau kedua belah pihak mengklaim hanya menargetkan fasilitas militer di sepanjang perbatasan, korban sipil tak dapat dihindari. Ketika artikel ini ditulis, tercatat lebih dari 30 warga sipil yang menjadi korban dari kedua belah pihak. Konflik tidak hanya diikuti oleh saling tukar serangan, tapi juga penghentian sementara perjanjian pengelolaan air kedua belah pihak.

Sejarah permusuhan India-Pakistan

Permusuhan India-Pakistan dapat ditarik ke belakang jauh sebelum terbentuknya negara-bangsa India/Pakistan. Konflik antar kerajaan-kerajaan Hindu dan Islam, yang diikuti oleh konflik komunal antara penganut kepercayaan tersebut di anak benua India merupakan peristiwa yang mewarnai sejarah kedua bangsa. Ketika anak benua India dikuasai oleh pemerintah kolonial Inggris pun, konflik masih terjadi dan bibit-bibitnya masih hidup sampai kemerdekaan India.

Pemisahan Pakistan (mayoritas Muslim) dari India (mayoritas Hindu) menjadi babak baru konflik antar negara/bangsa. Konflik berlanjut dalam memperebutkan Kashmir dan dipertajam dengan dukungan India terhadap pemisahan Bangladesh (Pakistan Timur) dari Pakistan. Kedua belah pihak telah terlibat dalam empat kali konflik bersenjata besar (1947-1948, 1965, 1971, dan 1999), dan tiga di antaranya terkait Kashmir. Sejak itu, baik India dan Pakistan merupakan dua bangsa yang gencar melakukan “militerisasi” negara di kawasan Asia Selatan. Keduanya juga tercatat sebagai negara dengan kekuatan nuklir aktif.

Perang nuklir?

Walaupun adanya kekhawatiran terkait intensitas konflik saat ini, perang nuklir ataupun perang total tetap menjadi sesuatu hal yang “sulit terjadi” ditinjau dari faktor sejarah, doktrin strategis, dan diplomasi internasional. Melihat ke belakang saat Perang Dingin, dunia menyaksikan konfrontasi beresiko tinggi antara dua kekuatan nuklir (AS dan Uni Soviet). Namun, tak satu pun senjata nuklir digunakan oleh kedua belah pihak. Doktrin “penangkalatan” dan konsekuensi bencana kemanusiaan dan lingkungan sebagai dampak perang nuklir mencegah eskalasi menuju perang nuklir. Dalam hal yang sama, India dan Pakistan sama-sama menyadari melewati “ambang batas” nuklir hanya akan memunculkan kecaman global, kejatuhan regional, dan dampak yang mengerikan terhadap populasi dan infrastruktur keduanya.

Kedua belah pihak telah memiliki doktrin nuklir yang mirip. India telah mendeklarasikan “no first use” yang berarti negara tersebut tidak akan menggunakan senjata nuklir jika tidak diserang duluan oleh senjata nuklir. Sementara, Pakistan –

walaupun tidak menyatakan secara terang-terangan – senjata nuklir hanya menjadi pilihan terakhir, untuk tujuan penangkalan. Kedua prinsip tersebut dapat secara efektif mencegah peluncuran nuklir. Ini sejalan dengan keyakinan bahwa senjata nuklir adalah sarana penangkalan yang paling efektif.

Ad by **Criteo**[Report this ad](#)[Ad choices](#)

Selain itu, aktor global dan regional seperti AS, Tiongkok, Rusia, dan PBB telah vokal mendesak kedua belah pihak melakukan deeskalasi dan menahan diri. Tidak satupun mengharapkan konflik meluas menjadi perang total. Aktor-aktor tersebut menekankan pentingnya dialog, bukan aliansi militer, dengan demikian mengurangi kemungkinan keterlibatan pihak luar yang dapat mengintensifkan konflik.

Konflik India-Pakistan saat ini memang mengkhawatirkan, namun preseden, doktrin, dan tekanan internasional menjadikan konflik tersebut berada dalam batas-batas militer konvensional. Hal yang paling buruk – bila terjadi – kemungkinan dalam bentuk “ketegangan panjang” antara ke dua belah pihak, tapi tetap dimoderasi oleh diplomasi, ketimbang jatuh pada perang nuklir ataupun perang total.

Politik domestik

Bila perang nuklir ataupun perang total tidak akan terjadi, lalu mengapa kedua belah pihak (tetap) saling tukar serangan terbatas? Politik domestik di India dan Pakistan memiliki andil dalam menciptakan eskalasi konflik karena pemimpin di kedua negara menghadapi tekanan internal yang mendorong tindakan agresif dan memberikan keuntungan politik. Di India, pemerintahan Bharatiya Janata Party (BJP) yang sedang berkuasa telah sering mengangkat retorika nasionalisme – didukung oleh ideologi “Hindutva” – dan prinsip kuat dalam keamanan nasional untuk mengkonsolidasikan dukungan. Isu Kashmir erat kaitannya dengan identitas nasional India yang dikonstruksi oleh pemerintah yang berkuasa saat ini, menjadi simbol unjuk kekuatan dan keutuhan. Sebelumnya pemerintah India mencabut status otonomi wilayah Kashmir yang semakin memperkuat gerakan separatis Kashmir dan mempertajam konflik komunal di negara tersebut. Beberapa ketegangan politik dengan Pakistan telah berkontribusi memperkuat sentimen anti-Muslim di kalangan Hindu India beberapa tahun terakhir. Respon yang keras terhadap Pakistan menjadi cara untuk menyatukan dukungan konstituen, khususnya kalangan Hindu konservatif dan sayap kanan, serta menjauhkan perhatian dari berbagai tantangan sosial atau ekonomi yang terjadi saat ini.

Di Pakistan, militer terus memberikan pengaruh substansial terhadap kebijakan luar negeri terkait India dan Kashmir. Di saat-saat pemerintahan sipil menghadapi krisis ekonomi, instabilitas politik, atau tantangan terhadap legitimasi pemerintah, konfrontasi dengan India dapat berlaku sebagai narasi yang menyatukan dan sebagai sarana untuk reaffirmasi peran militer sebagai penjaga keamanan nasional. Selain itu, sentimen anti-India tetap menjadi kuat dalam wacana domestik, dan pemerintah enggan untuk tampak lemah ataupun mundur, khususnya di bawah tekanan publik dan institusional.

Ad by **CRITEO**[Report this ad](#)[Ad choices](#)

Hasilnya, apa yang seharusnya menjadi “insiden lokal” kemudian dengan cepat dipolitisasi di mana kedua belah pihak terkunci dalam posisi sulit oleh ekspektasi dan dinamika politik internal. Ini membuat deeskalasi atau pencegahan, khususnya di awal-awal konflik, menjadi sulit, kompromi hanya akan dianggap sebagai bentuk kelemahan domestik. Akhirnya, kalkulasi politik domestik – tidak hanya “kebutuhan” strategis – telah mendorong konflik antara India-Pakistan seperti saat ini.

Transfer persenjataan

Mengutip laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), India merupakan importir senjata terbesar ke-2 di dunia (8,3% dari impor senjata global sepanjang 2020-2024), sedangkan Pakistan menduduki posisi ke-5 (4,6% dari impor senjata global sepanjang 2020-2024). Konflik saat ini memiliki implikasi berupa peningkatan intensitas transfer senjata ke kedua belah pihak. Dalam sejarah, wilayah dengan ketegangan berkepanjangan seperti Timur Tengah (perang Iran-Irak), atau Eropa Timur (perang Rusia-Ukraina) telah memicu peningkatan transfer senjata dari pemasok tradisional maupun pemasok baru. Ukraina, misalnya, telah menjadi importir senjata terbesar di dunia yang didorong oleh invasi Rusia.

India dan Pakistan memiliki motivasi strategis untuk memodernisasi and memperkuat persenjataan, tidak hanya untuk menegaskan dominasi tapi juga menangkal ancaman. Walau India mulai mengurangi ketergantungan pasokan senjata dari mitra tradisionalnya seperti Rusia dan memajukan industri pertahanan domestik, kemitraan pertahanan dengan AS, Perancis, dan Israel menjadikannya sebagai target utama bagi pemasok senjata. Sebaliknya, aliansi strategis Pakistan dengan Tiongkok dan ketergantungan historis pada teknologi militernya memberikan peluang bagi Beijing untuk memperkuat pengaruh melalui kesepakatan perdagangan senjata. Begitu juga bagi pemasok lainnya seperti Turki sebagai pemain baru di Asia Selatan.

Selain itu, negara pemasok senjata sering melihat konflik sebagai peluang ekonomi dan strategis untuk memperlebar jangkauan geopolitik. Peningkatan militerisasi di Asia Selatan mencerminkan pola yang telah terjadi di wilayah lain, di mana persaingan menjadi pemicu permintaan teknologi canggih persenjataan dan rantai pasok yang berkelanjutan. Misalnya, AS dan negara-negara Eropa mengakselerasi penjualan senjata ke Taiwan dalam merespon ketegangan dengan Tiongkok, sementara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi menjadi penerima senjata dari barat selama konflik regional. Dalam hal yang sama, pemasok senjata sekarang memiliki insentif untuk menyediakan India dan Pakistan persenjataan canggih, sistem pengintaian, dan teknologi penanggulangan (countermeasure) untuk memperkuat penangkalan.

Dinamika ini tidak hanya berisiko menciptakan eskalasi perlombaan persenjataan antara ke dua tetangga bersenjata nuklir tersebut, tapi juga membuka pintu bagi ketergantungan yang semakin panjang pada dukungan militer asing, memperkuat pola di mana instabilitas geopolitik menjadi katalis bagi perdagangan senjata global.